KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Bakal Bangun Gedung Baru : Anggaran jadi Rp 5,7 Triliun
Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1 & 15

DPR Bakal Bangun Gedung Baru

Anggaran Jadi Rp 5,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat membangun gedung baru mulai tahun 2018 hendaknya mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Penataan kawasan parlemen sebaiknya sesuai prioritas kebutuhan karena rakyat memerlukan alokasi anggaran untuk hal produktif.

DPR mendapatkan pagu anggaran Rp 5,7 triliun untuk tahun 2018, naik dari sebelumnya Rp 4,3 triliun. Meskipun ada kenaikan anggaran Rp 1,4 triliun, sejumlah anggota DPR meminta alokasi dana dan pekerjaan pembangunan gedung baru DPR dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar bisa diawasi secara transparan.

Saat ini, 560 anggota DPR mengisi ruang kerja berukuran 4 meter x 6 meter mulai dari lantai 3 hingga 23 Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen, Jakarta. Berdasarkan pantauan *Kompas* di Gedung Nusantara I, Jumat (11/8), ruangan tersebut dibagi dua lagi, yaitu area berukuran 4 meter x 4 meter untuk ruang kerja anggota DPR dan berukuran 4 meter x 2 meter diisi beberapa tenaga ahli, asisten pribadi, dan sekretaris.

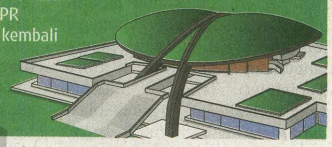
"Sehari-hari saya memiliki tiga tenaga ahli dan dua asisten pribadi yang bekerja di ruang itu," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Irma Suryani Chaniago.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPR Hendrawan Supratikno menambahkan, ada pula

(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)

PENATAAN KAWASAN PARLEMEN

Rencana pembangunan gedung dan fasilitas baru DPR sebenarnya muncul sejak periode 2009-2014. Publik pun menolak rencana ini. Di DPR periode 2014-2019, usulan ini kembali muncul setiap tahun saat pembahasan APBN dengan rencana penataan kawasan parlemen.



- **8 Januari 2016** Hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menyebutkan, ada sembilan proyek tidak wajar. Salah satunya proyek pembangunan kompleks DPR senilai Rp 570 miliar.
- **29 Februari 2016** Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan moratorium pembangunan gedung baru, termasuk pembangunan kompleks DPR.
- **1 Maret 2016** Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono meminta pemerintah agar DPR diberi pengecualian terkait kebijakan moratorium pembangunan gedung baru.
- **3 Maret 2016** Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan, moratorium pembangunan gedung baru yang dilanjutkan oleh pemerintah merupakan hal baik dan juga berlaku bagi DPR.
- **6 April 2017** Rapat Paripurna DPR mengesahkan hasil rapat pleno BURT DPR yang mengajukan anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp 7,2 triliun atau naik Rp 3 triliun dari tahun 2017 sebesar Rp 4,2 triliun.
- **9 Mei 2017** Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pagu indikatif DPR tahun 2018 sebesar Rp 4,3 triliun.
- **25 Juli 2017** Setelah membahas kembali bersama DPR, kedua menteri tersebut menyampaikan pagu anggaran DPR untuk 2018 menjadi Rp 5,7 triliun. Artinya, DPR mendapatkan tambahan Rp 1,4 triliun dari pagu indikatif anggaran 2018.

Sumber: Litbang "Kompas"/XNA/YOH, diolah dari laman pu.go.id, Peraturan DPR RI Tahun 2014 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI, GNWT Office Space Standards and Guidelines Tahun 2012, dan pemberitaan "Kompas".

INFOGRAFIK: ARDIANSYAH

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Bakal Bangun Gedung Baru

(Sambungan dari halaman 1)

tenaga ahli dan asisten pribadi anggota DPR yang harus bergantian duduk untuk bekerja karena sempitnya ruangan.

Saking sempitnya ruang kerja tersebut, anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, sering mengizinkan tenaga ahlinya bekerja dari luar Kompleks Parlemen. Dia sadar tidak nyaman bagi mereka untuk bisa bekerja di sana. "Ruangan seluas itu idealnya hanya diisi dua orang," tambahnya.

Tidak perlu besar

Kalaupun dibangun, menurut Arsul Sani, gedung baru tidak perlu terlalu besar. Menurut Arsu, Gedung Nusantara I juga masih bisa direnovasi untuk memperluas ruangan anggota DPR.

Gedung baru pun tidak perlu terlalu mewah, apalagi dilengkapi fasilitas yang tidak penting seperti kolam renang atau spa seperti usulan yang muncul tahun 2010. Jika mengikuti panduan dan standar ruang kerja yang dikeluarkan Government of the Northwest Territories (GNWT) tahun 2012, ruangan kerja tertutup seluas 22,5 meter persegi sebenarnya dapat menampung hingga lima orang.

Selain harus mempertimbangkan keuangan negara, Hendrawan meminta agar alokasi anggaran dan pekerjaan pembangunan gedung baru diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Menurut Hendrawan, hal ini penting untuk menepis pandangan negatif publik bahwa anggota DPR mengejar keuntungan proyek gedung baru tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, penataan kawasan parlemen akan berjalan bertahap sesuai anggaran negara. Untuk tahap awal mulai tahun 2018, direncanakan dialokasikan sekitar Rp 500 miliar dari Rp 5,7 triliun pagu anggaran DPR yang memprioritaskan pembangunan gedung baru bagi anggota DPR.

Namun, Fahri menilai pembangunan alun-alun demokrasi juga perlu diprioritaskan. "Jadi semua unjuk rasa dipusatkan di alun-alun," katanya.

Dalam program penataan kawasan parlemen juga ada rencana pembangunan apartemen untuk anggota DPR memanfaatkan lahan bekas Taman Ria Senayan yang berdekatan dengan Gedung DPR (*Kompas*, 11/8). Anggota DPR enggan menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan, karena jauh dari Kompleks Parlemen.

Hal ini pula yang membuat Kompleks Perumahan DPR Kalibata, Jumat, tampak lengang. Pintu sejumlah rumah tertutup rapat dengan lampu teras yang masih menyala.

Seorang warga yang ditemui di dekat Kompleks DPR, Kalibata, Mila, mengatakan, setahunya banyak rumah di sana yang ditinggali kerabat anggota DPR. "Anggota DPR-nya tinggal di tempat lain. Yang saya tahu di dalam itu saudaranya yang menempati rumah," ujar Mila.

Kondisi Gedung DPR saat ini memang sudah tidak memadai, apalagi pada periode 2019-2024 anggota DPR bertambah 15 orang sesuai amanat Undang-Undang Pemilu.

Empati wakil rakyat

Akan tetapi, rencana pembangunan gedung baru tetap perlu mempertimbangkan perasaan rakyat. "Pertanyaan yang perlu dijawab oleh DPR berkaitan empati mereka sebagai wakil rakyat adalah apakah relevan dan mendesak pembangunan dilakukan saat ini, saat rakyat dihadapkan pada situasi ekonomi yang berat?" ujar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Menurut Zuhro, dalam kondisi perekonomian yang belum baik, DPR, terutama fraksi-fraksi pendukung pemerintah, perlu mendukung agar anggaran dialokasikan untuk kegiatan produktif guna memulihkan perekonomian. "Tidak seperti sekarang ini yang menandakan komunikasi antara pemerintah dan fraksi-fraksi pendukungnya di DPR tidak dirawat baik," kata Zuhro.

Sementara Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya DPR memahami kondisi keuangan negara saat ini. Kondisi di mana defisit anggaran besar, begitu pula utang negara yang besar. Hal ini diperberat lagi pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

DPR sebagai wakil dari rakyat seharusnya juga paham kesulitan yang dihadapi rakyat saat ini. Rakyat yang untuk memenuhi kebutuhan dasar saja masih kesulitan. Ditambah kelesuan yang masih dihadapi dunia usaha.

"Dengan kondisi-kondisi itu, seharusnya DPR memprioritaskan anggaran yang ada untuk hal-hal yang produktif yang bisa membantu rakyat di tengah kondisi berat yang dihadapinya, membantu dunia usaha dari tantangan berat yang dihadapi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Enny. (APA/DD10)

Suarakan komentar Anda mengenai artikel ini dan baca di kompas.id